

PENGARUH PERSEPSI BENDAHARA PENGELUARAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

I Dewa Gede Sayang Adi Yadnya

APK APBN pada Kemendikbudristek; Asesor LSP3 BNSP RI

idewa.adiyadnya@gmail.com

Abstract

Received: 02-02-2022
Accepted: 08-02-2022
Published: 20-02-2022
Keywords: expenditure
treasurer;
organizational
commitment;
performance;
KKP

Introduction: One aspect that has a role and influence on the speed of a country's economic growth is the payment system. The Indonesian government is trying to carry out various strategies in an effort to increase the use of non-cash cash. The KKP policy was issued as a government effort towards effectiveness and efficiency in managing state treasury finances. The implementation of this KKP policy cannot be separated from the linkage of the role of the treasurer and organizational commitment. **Purpose:** The purpose of this study was to analyze the effect of the treasurer's perception of spending and organizational commitment on the performance of government credit card users partially. **Methods:** This research is a quantitative research through regression analysis approach. The research instrument is a questionnaire using a scoring technique of one to five from the Likert scale theory. The number of respondents was 33 respondents consisting of treasurers, employees and government credit card users in work units within the Secretariat General of the Ministry of Education and Culture. **Results:** The results showed: 1) there was a significant effect of the treasurer's perception of spending on the performance of using government credit cards; 2) there is a significant effect of organizational commitment on the performance of using government credit cards. The limitations of the respondents in this study do not guarantee that the results of the analysis can be generalized regarding the implementation of MPAs throughout Indonesia. **Conclusion:** The results of the first analysis concluded that there was a significant effect of the treasurer's perception of spending on the performance of using government credit cards. The results of the second analysis concluded that there was a significant effect of organizational commitment on the performance of using government credit cards.

Abstrak

Kata kunci: bendahara pengeluaran; komitmen organisasi; kinerja; KKP

Pendahuluan: Salah satu aspek yang mempunyai berperan dan berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah sistem pembayaran. Pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan bermacam-macam strategi dalam upaya meningkatkan penggunaan uang non tunai. Kebijakan KKP dikeluarkan sebagai upaya pemerintah terhadap efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan kas negara. Penyelenggaraan kebijakan KKP ini tidak lepas dari keterkaitan peran bendahara dan komitmen organisasi. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh persepsi bendahara pengeluaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja pengguna kartu kredit pemerintah secara parsial. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif melalui pendekatan analisis regresi. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner menggunakan teknik penskoran satu sampai lima dari teori skala likert. Jumlah responden adalah 33 responden yang terdiri dari unsur bendahara, karyawan dan pengguna kartu kredit pemerintah pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan: 1) terdapat pengaruh yang signifikan persepsi bendahara pengeluaran terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah; 2) terdapat pengaruh yang signifikan komitmen organisasi terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah. Keterbatasan responden pada penelitian ini, tidak memberikan jaminan bahwa hasil analisis dapat digeneralisasikan terkait pelaksanaan KKP di seluruh Indonesia. **Kesimpulan:** Hasil analisis pertama disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan persepsi bendahara pengeluaran terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah. Hasil analisis kedua disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan komitmen organisasi terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah.

Corresponding Author: I Dewa Gede Sayang Adi Yadnya
E-mail: idewa.adiyadnya@gmail.com



PENDAHULUAN

Sistem pembayaran adalah salah satu aspek yang mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, bahkan apabila sistem pembayaran kurang baik maka dapat menjadi penghambat (Maksum et al., 2021). Sistem pembayaran non-tunai dalam berbagai transaksi baik pembelian barang dan jasa maupun transaksi lembaga-lembaga publik mempunyai nilai transaksi tinggi (Truong et al., 2020). Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keragaman, baik dalam budaya maupun aspek-aspek lainnya dengan jumlah penduduk yang besar (Ulfa et al., 2021). Mayoritas penduduknya masih kurang mengenal istilah transaksi non-tunai bahkan tidak sedikit yang belum mempunyai rekening di bank, selain itu terbatasnya akses layanan perbankan di daerah-daerah di Indonesia (Azali, 2016).

Sampai saat ini pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan bermacam-macam strategi dalam upaya meningkatkan penggunaan uang non tunai. Sebagai bukti, pada tahun 2014 tanggal 14 Agustus, Bank Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk mempromosikan sistem pembayaran yang lebih mudah digunakan (Selfira et al., 2019). Pada tahun 2016 diluncurkan juga Perpres Indonesia no. 82 terkait strategi inklusi keuangan yang diharapkan mampu menyediakan layanan-layanan pada sektor keuangan yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau untuk semua kalangan masyarakat Indonesia (Habibullah, 2019).

Pada tahun 2019 di bulan Juli, Indonesia mulai menerapkan metode non-tunai pada tagihan yang berasal dari rekanan pemerintah dengan menggunakan kartu kredit pemerintah atau KKP (Said & Sutiono, 2021). Kartu kredit sendiri dapat diartikan sebagai alat untuk transaksi pembayaran, melalui KKP ini transaksi pembayaran atas semua kewajiban penduduk yang berasal dari aktifitas ekonomi, selain itu juga meliputi transaksi penarikan tunai dan atau transaksi belanja, yang mana kewajiban pengguna kartu dibayarkan diawal oleh penerbit, kemudian pengguna kartu kredit melakukan pembayaran sebagai bentuk kewajiban dengan rentan waktu sesuai dengan kesepakatan baik melalui metode angsuran maupun bayar lunas (Harits, 2021).

Kebijakan KKP ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah terhadap efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan kas negara (Maulid & Sudibyo, 2020). Pada pelaksanaannya, kebijakan ini perlu didukung oleh beberapa pihak yang mempunyai peranan penting agar tujuan kebijakan ini tercapai secara maksimal. Maulid & Sudibyo (2020), Yulianti & Nurhazana (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kerjasama bendahara pengeluaran, komitmen organisasi dan pengguna KKP mempunyai peranan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Bendahara pengeluaran merupakan pihak yang mempunyai peran terhadap pengelolaan keuangan dan mempunyai tanggung jawab atas kegiatannya tersebut (Afriansyah, 2019). Lambat atau cepatnya proses keuangan dipengaruhi oleh salah satunya adalah peran bendahara (Suryati, 2018). Bendahara selain berfungsi sebagai pihak pengelola anggaran belanja untuk negara, juga difungsikan sebagai pihak pengelola anggaran yang diterima oleh negara (Harits, 2021).

Komitmen organisasi dalam pengertian umum adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama oleh keseluruhan anggota sebuah organisasi berkaitan dengan pedoman, penyelenggaraan dan tujuan organisasi tersebut (Muis et al., 2018). Kemampuan jaringan yang perlu dibangun adalah komunikasi antar individu pada suatu organisasi maupun antar organisasi (Dhameria et al., 2021). Dhondt et al., (2014) mengatakan level komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pekerja. Komitmen organisasi juga merupakan sebuah keinginan yang kuat supaya tetap menjadi bagian dari suatu organisasi tertentu, keinginan berusaha secara gigih agar selaras dengan tujuan organisasi (Pratiwi et al., 2020). Oleh karena itu, komitmen organisasi mencerminkan kesetiaan, keterlibatan, kekuatan dan kesejahteraan karyawan dalam suatu organisasi. Menurut Elisabeth et al., (2021); Tree & Suryoko, (2016) unsur-unsur komitmen organisasi terdiri dari komitmen afektif, komitmen normatif dan komitmen berkelanjutan.

Aspek komitmen afektif pada komitmen organisasi adalah sebuah ikatan emosi yang menunjukkan suatu keterlibatan karyawan dalam suatu organisasi sehingga memacu semangat karyawan untuk mempersembahkan kinerja yang lebih terhadap organisasi tersebut (Astuti & Panggabean, 2014). Aspek komitmen organisasi ini diharapkan bisa ditanamkan dalam diri karyawan agar organisasi dapat mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal.

Aspek komitmen normatif pada komitmen organisasi adalah sebuah perasaan yang mengharuskan seorang karyawan untuk selalu setia dan tetap ada di sebuah organisasi (Darmawati & Hayati, 2013). Aspek komitmen organisasi ini diharapkan suatu organisasi memberikan sesuatu kepada karyawan bertujuan untuk menjaga kesetiaan bahkan loyalitas terhadap organisasi tersebut. Nilai komitmen normatif yang tinggi secara otomatis membantu organisasi untuk dapat mencapai tujuan secara maksimal.

Aspek komitmen berkelanjutan pada komitmen organisasi yaitu berkaitan erat dengan hubungan rasional antara pengunduran diri karyawan maupun keluar dari sebuah organisasi didasarkan atas kerugian (Yusuf & Syarif, 2018). Secara rasional karyawan yang mempunyai nilai komitmen berkelanjutan bagus maka timbul kesetiaan dan tetap menjaga hubungan dengan organisasi tertentu. Oleh karena itu, komitmen berkelanjutan mempunyai peranan penting agar suatu organisasi dapat mencapai tujuan secara maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, pengkajian terkait bendahara pengeluaran dan komitmen organisasi masih perlu dilakukan supaya program-program yang dijalankan oleh suatu organisasi berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan secara maksimal. Berkaitan dengan penggunaan kartu kredit pemerintah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh persepsi bendahara pengeluaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja pengguna kartu kredit pemerintah secara parsial.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kuantitatif melalui pendekatan analisis regresi. Analisis ini bertujuan membantu memperkirakan hubungan pengaruh kenaikan ataupun penurunan beberapa variabel (Hidayat, 2018). Penelitian ini dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek dengan jumlah responden 33 yang terdiri dari unsur bendahara, karyawan dan pengguna kartu kredit pemerintah. Instrumen penelitian menggunakan teknik penskoran satu sampai lima dari teori skala likert. Tabel 1 berikut ini adalah indikator-indikator dari konsep persepsi bendahara pengeluaran, komitmen organisasi dan kinerja pengguna kartu kredit pemerintah pada instrumen penelitian ini.

Tabel 1. Indikator Instrumen Kuesioner

No.	Indikator Aspek Penilaian	Jumlah
1	Persepsi Bendahara Pengeluaran	3
2	Komitmen organisasi	
	a. Aspek komitmen afektif	3
	b. Aspek komitmen normatif	3
	c. Aspek komitmen berkelanjutan	3
3	Kinerja Penggunaan KKP	3
	Total pernyataan	15

Data jawaban dari semua indikator pada tabel 1 diolah secara statistik menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS kemudian menyimpulkan hipotesis penelitian ini apakah bisa diterima atau tidak. Berikut hipotesis pada penelitian ini.

Hipotesis 1 yaitu terdapat pengaruh yang signifikan persepsi bendahara pengeluaran terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah.

Hipotesis 2 yaitu terdapat pengaruh yang signifikan komitmen organisasi terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Tabel 2 berikut ini adalah deskripsi hasil presentasi penilaian dari setiap jawaban kuesioner yang telah di isikan oleh responden.

Tabel 2. Deskripsi Hasil Kuesioner

No.	Indikator Aspek Penilaian	Penilaian
1	Persepsi Bendahara Pengeluaran	80,61
2	Komitmen organisasi	81,41
	a. Aspek komitmen afektif	83,84
	b. Aspek komitmen normatif	83,03
	c. Aspek komitmen berkelanjutan	77,37
3	Kinerja Pengguna KKP	80,61

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan penilaian dari responden adalah sangat baik terkait persepsi bendahara pengeluaran, komitmen organisasi dan kinerja penggunaan KKP. Rata-rata presentase penilaian persepsi bendahara pengeluaran 80,61% yang menunjukkan penilaian sangat tinggi. Rata-rata presentase penilaian komitmen organisasi 81,41% yang menunjukkan penilaian sangat tinggi. Pada komitmen organisasi terdiri dari masing masing aspek yaitu komitmen afektif 83,84%; komitmen normatif 83,03%; dan komitmen berkelanjutan 77,37%. Rata-rata presentase kinerja penggunaan KKP 80,61% yang menunjukkan penilaian sangat tinggi.

3. Hasil Analisis Regresi

Berdasarkan tiga buah hipotesis yang diajukan, untuk melakukan uji hipotesis satu dan dua secara parsial dilakukan dengan regresi sederhana. Pengolahan data memanfaatkan SPSS sebagai alat bantu analisis.

Analisis regresi sederhana pada hipotesis satu terkait pengaruh persepsi bendahara pengeluaran terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah. Hasil pengolahan melalui SPSS ditunjukkan oleh tabel 3.

Tabel 3. Output regresi sederhana hipotesis satu

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	42.778	15.664		2.731	.010
	Persepsi Bendahara Pengeluaran	.469	.194	.399	2.420	.022

a. Dependent Variable: Kinerja Penggunaan KKP

Berdasarkan tabel 3 dapat terbentuk persamaan regresi sederhana untuk hipotesis satu yaitu $Y = 42,778 + 0,469X$. Nilai konstanta 42,778 yang menunjukkan walaupun tidak ada penilaian pada persepsi bendahara pengeluaran maka penilaian kinerja penggunaan KKP tetap konsisten sebesar 42,778. Koefisien regresi 0,469 dan bernilai positif. Nilai positif ini bermakna semakin baik persepsi bendahara pengeluaran maka semakin tinggi kinerja penggunaan KKP.

Berdasarkan nilai t hitung 2,420 dan mempunyai signifikansi $0,022 < 0,05$ maka hasil analisisnya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan persepsi bendahara pengeluaran terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah.

Analisis regresi sederhana pada hipotesis dua terkait pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah. Hasil pengolahan melalui SPSS ditunjukkan oleh tabel 4.

Tabel 4. Output regresi sederhana hipotesis dua

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39.630	18.670		2.123	.042
	Komitmen Organisasi	.503	.229	.367	2.198	.036

a. Dependent Variable: Kinerja Penggunaan KKP

Berdasarkan tabel 4 dapat terbentuk persamaan regresi sederhana untuk hipotesis satu yaitu $Y = 39,630 + 0,503X$. Nilai konstanta 39,630 yang menunjukkan walaupun tidak ada penilaian pada komitmen organisasi maka penilaian kinerja penggunaan tetap konsisten sebesar 39,630. Koefisien regresi 0,503 dan bernilai positif. Nilai positif ini bermakna semakin baik komitmen organisasi maka semakin tinggi kinerja penggunaan KKP.

Berdasarkan nilai t hitung 2,198 dan mempunyai signifikan $0,036 < 0,05$ maka hasil analisisnya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan komitmen organisasi terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah.

4. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi pada hipotesis satu memberikan gambaran bahwa persepsi bendahara pengeluaran terkaita kesesuaian penerbitan KKP, sosialisasi penggunaan KKP dan ketersediaan layanan keluhan KKP memberikan dampak terhadap efektifitas penggunaan KKP. Said & Sutiono (2021) menyampaikan bahwa supaya penggunaan KKP lebih efektif perlu didukung oleh sosialisasi dan layanan yang memadai. Yulianti & Nurhazana (2021) menyampaikan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah diharapkan lebih efisien dan efektif dalam proses penyelenggaraannya sebagai wujud dari pelayanan publik.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada hipotesis dua menunjukkan bahwa aspek-aspek komitmen organisasi maka secara tidak langsung komitmen afektif, komitmen normatif dan komitmen berkelanjutan memberikan dampak terhadap efektifitas penggunaan KKP. Disisi lain (Islamy, 2016) menekankan bahwa komitmen afektif, komitmen normatif dan komitmen adalah bagian penting supaya tidak terjadi pergantian-pergantian anggota dalam sebuah organisasi yang menimbulkan ketidakstabilan anggota organisasi dalam berkerja. Dengan kata lain, apabila komitmen organisasi tidak dijaga maka berdampak kurang maksimalnya efektifitas penggunaan KKP.

KESIMPULAN

Peranan bendahara dan komitmen organisasi dalam menjaga efektifitas penggunaan kartu kredit pemerintah adalah penting. Hasil analisis pertama disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan persepsi bendahara pengeluaran terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah. Semakin baik persepsi bendahara pengeluaran maka semakin tinggi efektifitas kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah, begitupun sebaliknya semakin buruk persepsi bendahara pengeluaran maka semakin rendah efektifitas kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah.

Hasil analisis kedua disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan komitmen organisasi terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah. Semakin bagus komitmen organisasi maka semakin tinggi efektifitas kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah, begitupun sebaliknya semakin buruk komitmen organisasi maka semakin rendah efektifitas kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah. Keterbatasan responden pada penelitian ini, tidak memberikan jaminan bahwa hasil analisis dapat digeneralisasikan terkait pelaksanaan KKP di seluruh Indonesia.

BIBLIOGRAFI

- Afriansyah, B. (2019). Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Curup. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 5(1), 18–23.
- Astuti, D. P., & Panggabean, M. S. (2014). PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP RETENSI KARYAWAN MELALUI KEPUASAAN KERJA DAN KOMITMEN AFEKTIF PADA BEBERAPA RUMAH SAKIT DI DKI JAKARTA. *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, 7(1), 199. <https://doi.org/10.25105/jmpj.v7i1.527>
- Azali, K. (2016). Cashless in Indonesia: Gelling Mobile E-frictions? *Journal of Southeast Asian Economies*, 33(3), 364–386. <http://www.jstor.org/stable/44132411>
- Darmawati, A., & Hayati, L. N. (2013). Pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior. *Jurnal Economia*, 9(1), 10–17.
- Dhameria, V., Ghazali, I., Hidayat, A., & Aryanto, V. D. W. (2021). Networking capability, entrepreneurial marketing, competitive advantage, and marketing performance. *Uncertain Supply Chain Management*, 9(4), 941–948. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2021.7.007>
- Dhondt, S., Delano Pot, F., & O. Kraan, K. (2014). The importance of organizational level

- decision latitude for well-being and organizational commitment. *Team Performance Management*, 20(7/8), 307–327. <https://doi.org/10.1108/TPM-03-2014-0025>
- Elisabeth, D. R., Yulianti, R., Suyono, J., Chauhan, R., & Thakar, I. (2021). Affective Commitment, Continuance Commitment, Normative Commitment, and Turnover Intention in Shoes Industry. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 1937–1945.
- Habibullah, H. (2019). Inklusi Keuangan Dan Penurunan Kemiskinan: Studi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. *Sosio Informa*, 5(1).
- Harits, T. M. (2021). Konflik Norma Dalam Pengaturan Kartu Kredit Pemerintah. *Jurist-Diction*, 4(2), 759–774.
- Hidayat, A. (2018). Kemampuan Biostatistik melalui Pendekatan Investigasi pada Materi Regresi Sederhana. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(3), 1–11.
- Islamy, F. J. (2016). Pengaruh Komitmen Afektif, Komitmen Normatif dan Komitmen Berkelanjutan Terhadap Turnover Intention Pada Dosen Tetap STIE INABA Bandung. *Jurnal Indonesia Membangun*, 15(2), 1–18.
- Maksum, A., Muda, I., & Azhar, I. A. S. (2021). Opportunities for implementation of non-cash transactions of supply chain management of village-owned business agencies. *Uncertain Supply Chain Management*, 9(1), 69–78. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2020.11.008>
- Maulid, L. C., & Sudibyo, Y. A. (2020). Kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara di indonesia: permasalahan dan solusi. *AKUNTABEL*, 17(2), 301–313.
- Muis, M. R., Jufrizen, J., & Fahmi, M. (2018). Pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 1(1), 9–25.
- Pratiwi, A. M. A., Pertiwi, M., & Andriany, A. R. (2020). Hubungan Subjective Well Being dengan komitmen organisasi pada pekerja yang melakukan work from home di masa pandemi Covid 19. *Syntax*, 2(11), 825.
- Said, A., & Sutiono, S. (2021). Analisis Persepsi Bendahara Pengeluaran Atas Aspek Kepentingan dan Kinerja Pengguna dan Mitra Perbankan Dalam Penerapan Kartu Kredit Pemerintah. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 17–34. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.372>
- Selfira, Abdillah, G., Harahap, W., & Muda, I. (2019). Future Electronics Payment System Model. *Journal of Physics: Conference Series*, 1230(1), 012068. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1230/1/012068>
- Suryati, E. V. I. (2018). Sistem Pengeluaran Kas Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis. *Menara Ilmu*, 12(80).
- Tree, E., & Suryoko, S. (2016). Pengaruh komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, komitmen normatif terhadap kinerja karyawan melalui variabel organization citizenship behavior (ocb) sebagai variabel intervening pada pt. temprina media grafika semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 5(3), 1–14.
- Truong, T. H. L., Phan, H. M., & Tran, M. D. (2020). A study on customer satisfaction on debit cards: The case of Vietnam. *Uncertain Supply Chain Management*, 8(2), 241–254. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2020.1.003>
- Ulfa, E., Djubaedi, D., Sumarna, C., Fatimah, S., Suklani, S., & Hidayat, A. (2021). The Role of Teachers in Fostering Religious Multiculturalism. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(10), 349–354.
- Yulianti, D., & Nurhazana, N. (2021). Efektivitas kartu kredit pemerintah dalam meningkatkan transparansi keuangan negara pada KPPN Dumai. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3, 56–74.
- Yusuf, R. M., & Syarif, D. (2018). *Komitmen organisasi*. Nas Media Pustaka.